

ABSTRAK

BUMDesa sebagai sebuah badan usaha tentunya memerlukan modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dimana modal ini menjadi salah satu aspek penting dalam berjalannya kegiatan ekonomi suatu badan usaha, selain sebagai pembiayaan operasional modal juga dipakai untuk menentukan kemampuan finansial dari suatu badan usaha. BUMDesa yang merupakan produk dari UU Desa memiliki peranan penting untuk memajukan perekonomian desa, dengan adanya UU Desa pemerintah desa menjadi lebih mudah untuk mendirikan sebuah BUMDesa. UU Desa mengatur bahwasanya BUMDesa didirikan melalui Peraturan Desa, dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan juga oleh UU Desa, namun terkait dengan materi muatan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa khususnya modal BUMDesa yang bersumber dari kekayaan Desa yang dipisahkan tidak menunjukkan secara jelas bahwa besaran modal yang dipisahkan tersebut harus di cantumkan dalam Peraturan desa tentang Pendirian BUMDesa, sehingga dalam praktik di masyarakat khususnya desa-desa yang telah mendirikan BUMDesa memiliki model pengaturan yang berbeda-beda terkait Modal, sebagian dari Peraturan Desa tersebut sudah mencantumkan secara jelas besaran modal yang dimasukkan dalam BUMDesa dari pemisahan kekayaan Desa, namun banyak juga yang hanya mengatur sumber modal BUMDesa tersebut, tanpa adanya nilai atau besaran modal yang akan di tempatkan dalam BUMDesa, untuk itu dalam tesis ini akan dibahas 2 rumusan masalah yakni: 1 Keabsahan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDesa Yang Tidak Mencantumkan Besaran Modal Dasar, 2. Urgensi Pencantuman Modal Dasar Dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil dari pembahasan Tesis ini adalah Peraturan Desa tentang BUMDesa yang tidak mencantumkan besaran Modal pada saat pendirian BUMDesa tersebut, tetap sah dan berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial, serta ditetapkan oleh yang berwenang yakni Kepala Desa. Menelaah terhadap urgensi dari pencantuman besaran modal pada BUMDesa sebagai sebuah kepastian hukum terkait keuangan BUMDesa dan kekayaan Desa dalam BUMDesa tersebut. Sehingga setiap Peraturan Desa seharusnya mencantumkan besaran modal yang telah dipisahkan dari kekayaan Desa.

Kata Kunci: **Keabsahan, Peraturan Desa, BUMDesa, Modal**

ABSTACT

BUMDesa as a business entity certainly requires funds in carrying out its business activities, where these funds become one of the important aspects in the running of the economic activities of a business entity, besides being operational financing, these funds are also used to determine the financial capability of a business entity. BUMDesa which is a product of the Village Law has an important role to advance the village economy, with the existence of the Village Law the village government is easier to establish a BUMDesa. The Village Law stipulates that BUMDesa was established through Village Regulations, with procedures and procedures stipulated also by the Village Law, but related to the content of village regulations regarding the establishment of BUMDesa specifically BUMDesa funds sourced from separated Village assets do not show It is clear that the magnitude of the separated funds must be stated in the Village Regulation concerning the Establishment of BUMDesa, so that in practice in the community, especially villages that have established BUMDesa, have different regulation models regarding funds, some of the Village Regulations have clearly stated the funds included in BUMDesa from the separation of wealth of the Village, but many also only regulate BUMDesa funding sources, without the value or amount of funds to be placed in BUMDesa, therefore in this Thesis 2 problem formulations will be discussed 1 Legality of Village Regulations on Establishment BUMDesa that does not Include Basic Fund Amount, 2. Urgency of Inclusion of Funds Capital in Village Regulations concerning the Establishment of BUMDesa. This research is normative legal research using the Statute Approach, the Conceptual Approach. The results of this thesis discussion are Village Regulations on BUMDesa which do not specify the amount of funds at the time of the establishment of the BUMDesa, are still valid and valid as long as they do not contradict procedural and substantial legislation, and are determined by the Village Head as the authorized official. Reviewing the urgency of the inclusion of the amount of funds in BUMDesa as a legal certainty related to BUMDesa finance and village wealth in the BUMDesa. So that each Village Regulation should include the amount of funds that have been separated from the village's wealth.

Keywords: **Legality, Village Regulations, BUMDesa, Funds.**